



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BATAM**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.



Batam, 15 Januari 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam


Turman Hardianto Maha

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Sebagian besar capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran kegiatan Pangkalan PSDKP Batam Tahun pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dari 27 Indikator tercapai sebanyak 25 Indikator dan 2 Indikator belum memenuhi target. Untuk Indikator **Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan** tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih adanya hasil analisis SPKP yang belum dilakukan tindak lanjut berupa Permintaan Keterangan (BAP) namun sudah dilakukan pemanggilan. Sebagian besar pelaku usaha berada di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam namun kapal perikanan yang dioperasikan memiliki izin Pelabuhan Pangkalan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sehingga pelaksanaan permintaan keterangan akan dilakukan Ketika kapal perikanan yang terindikasi melaporkan kedatangan di Pelabuhan Pangkalan di wilayah pengawasan Pangkalan

PSDKP Batam serta dilakukan penjadwalan ulang. Selain itu indikator **Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam** tidak mencapai target dikarenakan terdapat deviasi halaman III DIPA pada kualitas perencanaan anggaran serta dalam kualitas pelaksanaan anggaran masih belum optimal pada pengelolaan dan penyerapan UP serta TUP. Sebagai upaya perbaikan, kedepan akan dilakukan monitoring terhadap Deviasi halaman III DIPA pada periode berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Kegiatan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **104,70** yang berpredikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023 sebesar Rp. 60.818.101.000,- yang kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 61.109.681.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. **61.067.454.707,-** atau **99,94%** serta Efisiensi penggunaan anggaran sebesar **1,60**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Ditjen. PSDKP	10
2.2 Visi, Misi dan Tujuan	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Batam.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
3.4 Akuntabilitas Keuangan	76
BAB IV PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Rekomendasi	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023	12
2. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.....	15
3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Tahun 2023 ..	17
4. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	5
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam	9
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2023 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2023.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
 - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin; dan
 - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Adanya kegiatan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan
 - b. Masih adanya pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dengan perizinan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

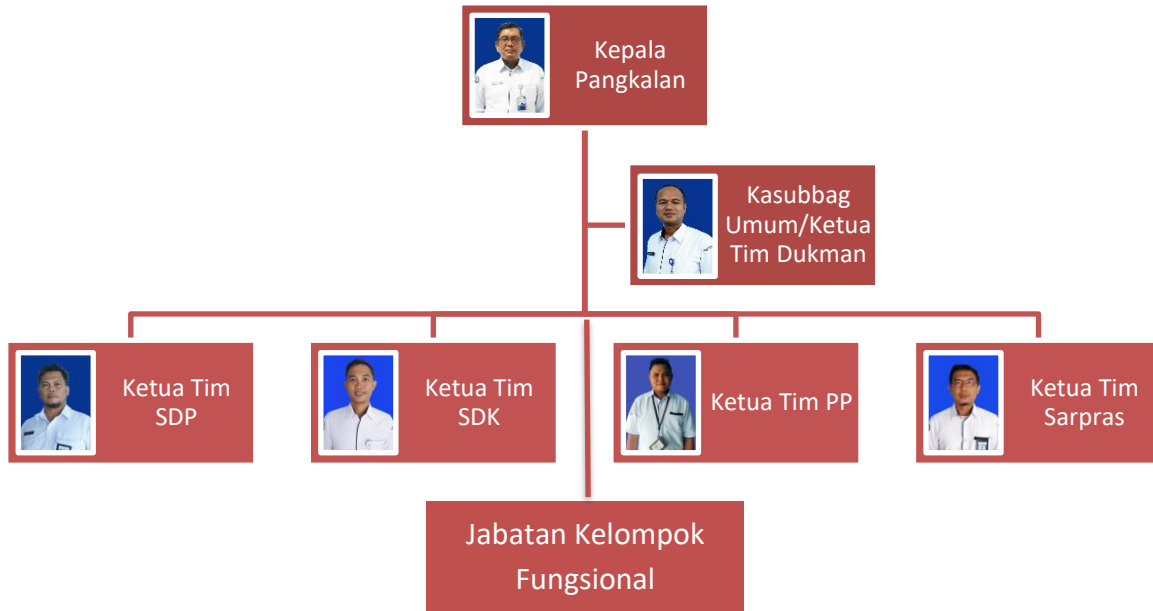
1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Perairan;
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi;
 - c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;
 - d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
 - e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
 - f. Pengawasan terhadap adanya Kegiatan *Destructive Fishing*;
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - b. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan; dan
 - c. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
4. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat/Unit Reaksi Cepat*;
5. Pendampingan POKMASWAS;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP; dan
7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal

Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 126 pegawai yang terdiri dari 90 PNS, 12 PPPK dan 24 tenaga kontrak sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;

- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2023.

c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Ditjen. PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 sebesar Rp. 62.686.869.000,- kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 61.109.681.000,-. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023 pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN			
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
		4. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	8. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	10. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (persen)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
SK4.1	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran	11. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	12.	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		13.	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	14.	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	15.	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	80
		16.	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		17.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	100
		18.	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	78
		19.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	80,5
		20.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75
		21.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21
		22.	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (inovasi)	1
		23.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	
24.		Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
25.		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
26.		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	93,75
27.		Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	82

Perjanjian kinerja tersebut merupakan revisi dari perjanjian kinerja sebelumnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan target indikator dengan rincian sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023

SEMULA		MENJADI	
INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-	-	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (persen)	100
Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang (persen)	100	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (persen)	100	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
-	-	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (persen)	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (persen)	100	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
-	-	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (persen)	100
-	-	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

SEMULA		MENJADI	
INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-	-	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	80,5
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	93,75

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan pengelolaan kinerja tahun 2023, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 10 Sasaran Kegiatan dengan 15 IKU dan 12 IK. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023

Skor Kinerja : 104.73

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Target Desember	Capaian Desember	%	Target s/d Desember	Capaian s/d Desember	%
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120,00			120,00	
IKU.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						107,73			107,73	
IKU.2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,60	87,60	100,00	114,16	87,60	100,00	114,16
IKU.3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,60	87,60	95,54	109,06	87,60	95,54	109,06
IKU.4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						100,00			100,00	
IKU.5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU.6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100,00			100,00	
IKU.7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan						100,00			100,00	
IKU.8	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	Persen	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100,00			100,00	
IKU.9	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan						100,00			100,00	
IKU.10	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	Persen	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK4.1	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						102,98			102,98	
IKU.11	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	86,79	108,49	80,00	86,79	108,49
IKU.12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	73,59	91,99	80,00	73,59	91,99
IKU.13	Indeks penyelesaian tindak lanjut penganan sanksi administratif	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	86,79	108,49	80,00	86,79	108,49
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						105,14			105,14	
IKU.14	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	93,00	97,78	105,14	93,00	97,78	105,14
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP						111,10			111,49	
IK.17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IK.18	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Indeks	Maximize	Akumulasi	78,00	78,00	89,04	114,15	149,00	162,52	109,07

IK 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21,00	21,00	28,18	120,00	21,00	28,18	120,00
IK 22	Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
IK 23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	133,33	120,00	92,00	133,33	120,00
IK 24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,50	77,50	100,00	120,00	77,50	100,00	120,00
IK 25	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,50	77,50	94,38	120,00	77,50	94,38	120,00
IK 26	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	93,75	91,59	97,70	93,75	91,59	97,70
IK 27	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	86,50	105,49	82,00	86,50	105,49
IKU 15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	89,00	111,25	80,00	89,00	111,25
IKU 16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	90,90	120,00	75,00	90,90	120,00
IKU 19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,50	80,50	81,25	100,93	80,50	81,25	100,93

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2023 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2023.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sampai dengan akhir Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1.1 (Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif)** yaitu:

1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	100	120,00
		2024	90		

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 80 dan ditetapkan sebagai target semesteran serta tercapai 100 pada tahun 2023. Indeks kualitas

pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. “*Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas*” merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan renstra, target pada akhir periode renstra mengalami kenaikan menjadi 90.

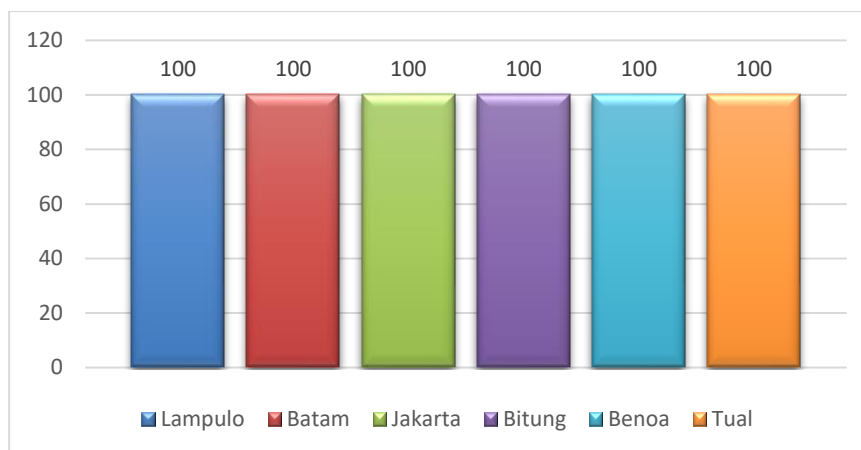
Tercapainya indikator ini dikarenakan adanya perencanaan yang baik tentang pelaksanaan kegiatan. Pangkalan PSDKP Batam sebelum penentuan jadwal pelaksanaan selalu berkoordinasi dengan pihak Anggota Komisi IV DPR RI selaku mitra dalam kegiatan ini melalui tenaga ahlinya. Selain itu Pangkalan PSDKP Batam telah memiliki *database* POKMASWAS yang berada di masing-masing wilayah kerja pengawasan, sehingga mempermudah dalam pemetaan pengawasan melalui POKMASWAS.

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan SDKP melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Batam dilaksanakan dalam tiga kali kegiatan selama tahun 2023. Kegiatan pertama dilaksanakan di Kab. Musi Rawas yang terselenggara dengan kerja sama antara Ditjen PSDKP KKP dalam hal ini Pangkalan PSDKP Batam dengan Anggota DPR RI Komisi IV ibu Dr. Riezky Aprilia. Sosialisasi ini dilaksanakan di Balai Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dan sebagai peserta sosialisasi adalah Pokmaswas Desa Muara Rengas dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 40 orang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan

pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 yang di hadiri oleh Perwakilan Pangkalan PSDKP Batam, Satwas SDKP Palembang, Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas, Kepala Desa Muara Rengas dan Tenaga ahli DPR RI.

Kegiatan kedua dilaksanakan di Ballroom Hotel Emilia, Palembang pada tanggal 18 November 2023 . Adapun tema kegiatan “Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan SDKP melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat”. Peserta sejumlah 50 orang dari 10 kelompok POKMASWAS Kabupaten OKI (POKMASWAS Sri Jaya, Maju Bersama, Maju, Ulak Jaya, Teluk Resau, Aur Jaya, Belanti Mandiri, Setule, Talang Enau dan Pancur). Narasumber kegiatan adalah Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten OKI dan Anggota Komisi IV DPR RI (Ibu Hj. Sri Kustina).

Selanjutnya kegiatan ketiga dilaksanakan di Hotel Duta Jambi pada tanggal 12 Desember 2023. Adapun tema kegiatan “Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan SDKP melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat”. Peserta sejumlah 80 orang dari 10 kelompok POKMASWAS Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (POKMASWAS Cinta Lestari, Cinta Lingkungan, Danau Lestari, Bangau Putih, Bahari Pilar Utama, Elang Laut, Berbak, Mapangaja, Camar Laut dan Belibis). Narasumber kegiatan adalah Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan Anggota Komisi IV DPR RI (Bapak M.R.Ihsan Yunus,BA.,B.Comm.,ME.Con).



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2023 sama yaitu 100%. Karena terselesaikannya kegiatan pembinaan POMASWAS yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dengan bermitra Anggota Komisi IV DPR RI. Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- dan tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp. 247.762.743,- atau 99,11%.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 dan IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1.2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

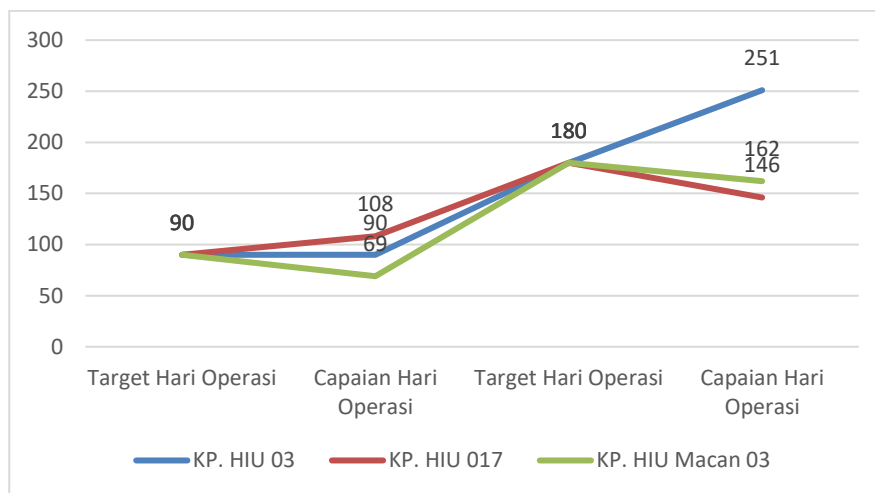
2) Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	85	94,38	111,04
		2023	87,6	100	114,16
		2024	90		

Target indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023 adalah 87,6 dan tercapai sebesar 100. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi

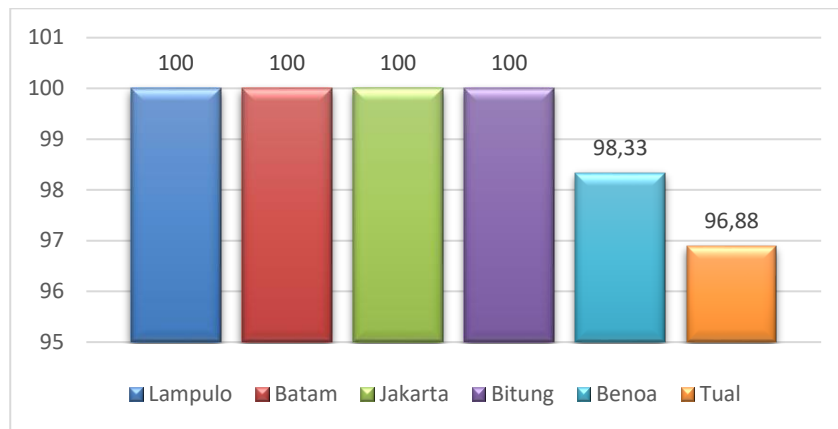
pengawasan yang melebihi dari target hari operasi pada tahun 2023. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 2 unit per hari operasi. Selain itu jumlah tangkapan dan tindak lanjut terhadap target operasi dilaksanakan dengan sangat baik.

Pada tahun 2023 kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan total 279 hari operasi. Terdapat 630 kapal yang diperiksa dan 15 diantaranya kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dilakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan di UPT/satwas/wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber daya perikanan, Kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan sebagaimana grafik berikut.



Indikator “*Indeks Kinerja Operasi kapal Pengawas*” pada tahun 2023 lebih tinggi dari pada tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan capaian hari operasi dari yang sebelumnya sebanyak 248 hari operasi menjadi 279 hari operasi

dilaksanakan oleh KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05. Jika dibandingkan dengan renstra, Pangkalan PSDKP Batam optimis pada target 90.

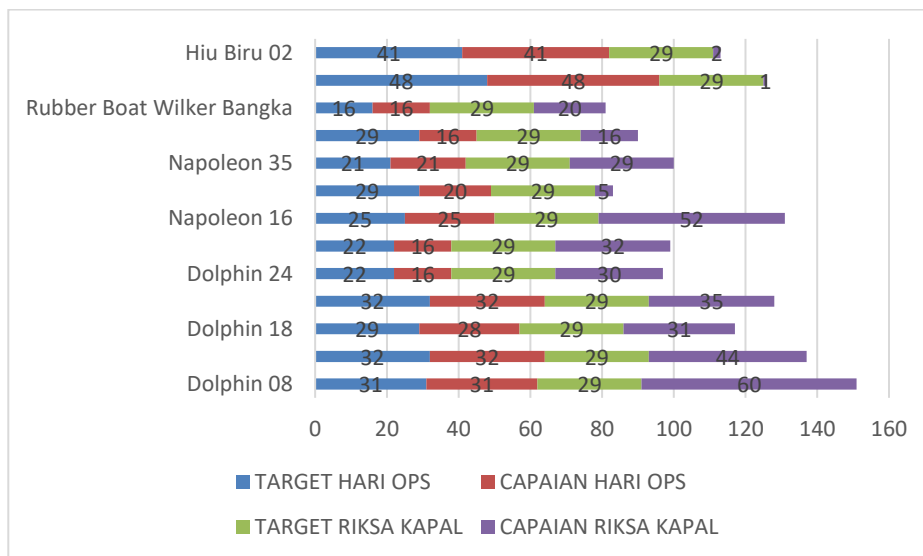


Capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Tual dan benoa. Hal tersebut dikarenakan jumlah kapal pengawas yang dioperasikan di Pangkalan PSDKP Batam lebih banyak sehingga cakupan serta jumlah kapal yang diperiksa lebih banyak. Selain itu kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penangkapan pada kapal perikanan asing maupun Indonesia yang telah melakukan pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP lainnya. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 20.575.568.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 28.872.967.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 28.870.819.441,- atau 99,99% dari pagu.

3) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

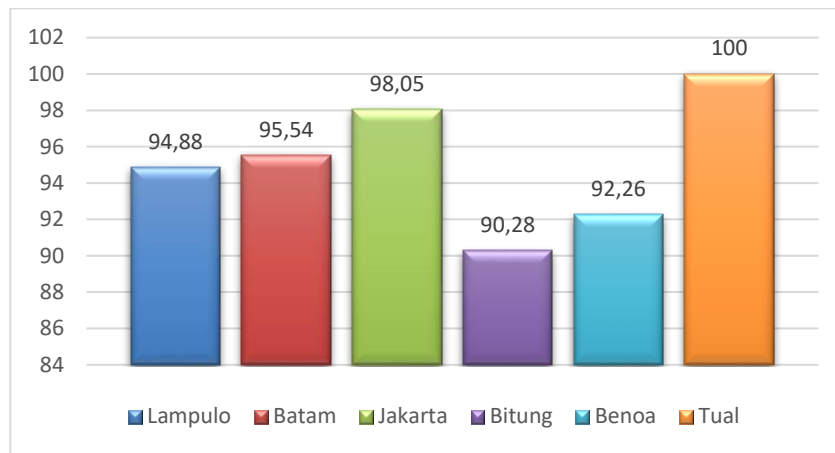
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	85	99,93	117,56
		2023	87,6	95,54	109,06
		2024	90		

Target indeks Kinerja Operasi Speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023 adalah 87,6 dan tercapai sebesar 95,54. Indikator ini mengukur kemajuan operasional speedboat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Tercapainya indikator ini pada tahun 2023 dikarenakan telah dilaksanakannya operasi pengawasan menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam dengan total 342 hari operasi dengan total kapal yang diperiksa sebanyak 357 unit dan lokasi pemantauan/pengintaian terhadap kegiatan penyelundupan *baby lobster* sebanyak 89 lokasi. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 unit per hari operasi dan 1 lokasi pengintaian. Jumlah hari operasi yang tinggi akan mempengaruhi cakupan wilayah pengawasan menggunakan *speedboat*.



Capaian indikator ini belum optimal jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat selisih indeks sebesar 4,39. Hal ini dikarenakan adanya penambahan target hari operasi yang sebelumnya rata-rata 12 hari operasi menjadi rata-rata 32 hari operasi dan tercapai rata-rata 27 hari operasi pada tahun 2023 yang kemudian dapat mempengaruhi capaian cakupan wilayah pengawasan. Jika dibandingkan dengan

target pada resntra, maka target pada akhir periode resntra mengalami kenaikan menjadi sebesar 90.



Apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo, Benoa dan Bitung maka capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah *Speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Pagu anggaran untuk operasi *speedboat* pengawas pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.550.263.000,- kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 2.360.731.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.360.516.777 ,- atau 99,99% dari pagu.

4) Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Target Presentase pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023 adalah 100% dan tercapai 100%. Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk

mendukung operasi pengawasan SDKP baik logistik untuk kapal maupun untuk personel. Terdapat beberapa indikator untuk mencapai target kegiatan ini, yaitu:

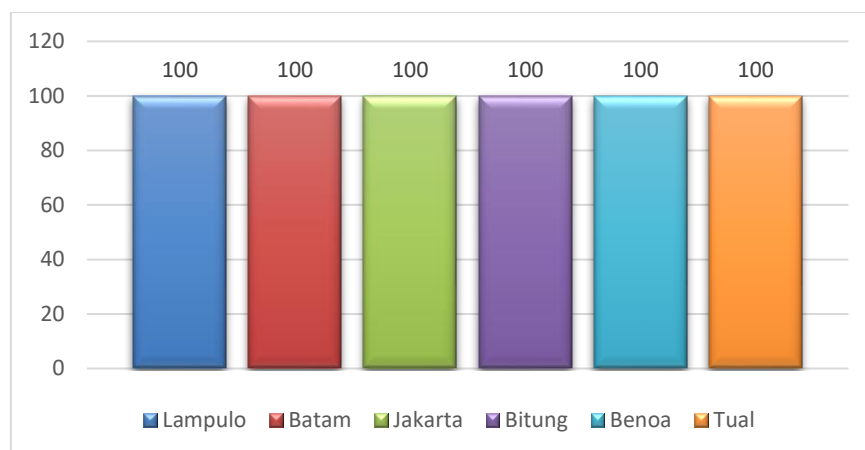
a. Pemenuhan logistik kapal:

- 1) Bahan bakar minyak (BBM)
- 2) Pelumas

b. Pemenuhan logistik Personel:

- 1) Bahan makanan
- 2) Air tawar
- 3) Alat-alat pelayanan (ATK, Bahan computer, komaliwan, peta, jurnal, dll)
- 4) Senjata api dan amunisi.

Tercapainya indikator ini dikarenakan seluruh logistik kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah terpenuhi mulai dari BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata api dan amunisi. IKU *“Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP”* merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan renstra, target ini konsisten pada target 100%.



Capaian indikator ini sama dengan Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini karena kebutuhan logistik pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP seluruhnya telah

terpenuhi, baik BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata dan amunisi. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 20.575.568.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 20.422.701.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 20.421.926.608,- atau 99,99% dari pagu.

Evaluasi dan analisis pada IKU5 dan IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan**

1.3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana

Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan) yaitu:

5) Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Target persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah 100% dan menjadi target tahunan serta tercapai 100%. Indikator merupakan target dalam pelaksanaan fisik renovasi bangunan Satwas SDKP Palembang. Bangunan tersebut sebelumnya merupakan bangunan yang digunakan oleh Balai Riset Perikanan Umum dan Penyuluh Perikanan (BRPPUPP). Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 dilaksanakan serah terima bangunan dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai BA nomor B.2257/PSDKP.1/PL.510/V/2022. Selanjutnya bangunan ini direncanakan akan digunakan sebagai Kantor Satwas SDKP Palembang mengingat lokasinya yang strategis. Namun, bangunan tersebut harus dilakukan renovasi terlebih dahulu

sebelum bisa digunakan. Karena bangunan ini sudah lama tidak difungsikan oleh pengguna sebelumnya.

Anggaran pada renovasi bangunan Satwas SDKP Palembang tahun 2023 hanya pada tahap perencanaan. Sehingga kegiatan renovasi bangunan belum dapat dilaksanakan dan direncanakan kegiatan fisik pada tahun 2024. Sehingga tercapainya indikator ini sesuai dengan informasi indikator kinerja bahwa Apabila dalam pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP dan pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir atau dihapuskannya anggaran, maka capaian sama dengan target. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru yang muncul di tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target pada renstra, maka target ini konsisten sebesar 100%.



Tidak seluruhnya Pangkalan PSDKP tidak mendapatkan anggaran untuk indikator ini, hanya Pangkalan PSDKP Batam dan Bitung. Capaian indikator ini sama yaitu 100% yang dikarenakan perencanaan/pembangunan/renovasi telah dilaksanakan. Pagu anggaran untuk renovasi bangunan kantor Satwas SDKP Palembang sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian dilakukan revisi menjadi perencanaan renovasi bangunan sebesar Rp. 192.767.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.724.562 atau 99,98%.

6) Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP

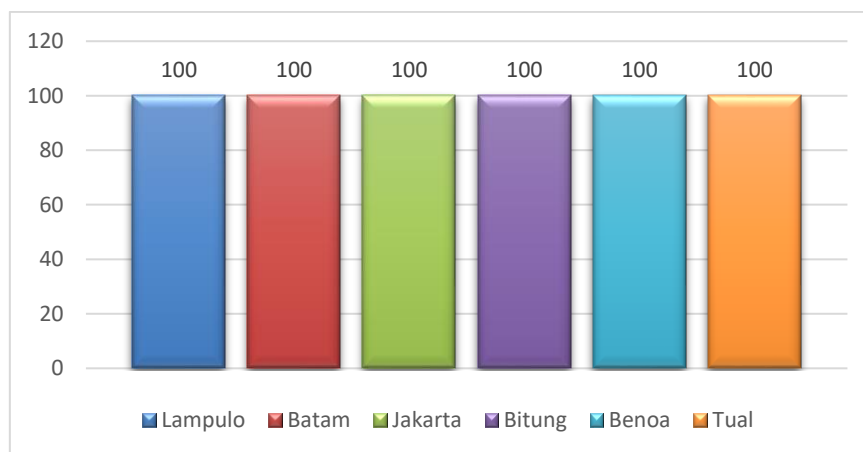
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan tercapai 100%. Perhitungan indikator ini membandingkan jumlah sarana pengawasan yang selesai dirawat dengan target kegiatan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Sarana pengawasan yang dimaksud meliputi kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*) dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05. Kemudian untuk *speedboat* pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 13 unit. Adapun rincian perawatan armada adalah sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana	Perawatan
1	KP Hiu Macan 05	Docking
2	KP Hiu 17	Docking
3	KP Hiu 03	Docking
4	Speedboat Pengawas Dolphin 08	Perawatan rutin
5	Speedboat Pengawas Dolphin 015	Perawatan rutin
6	Speedboat Pengawas Dolphin 018	Perawatan rutin
7	Speedboat Pengawas Dolphin 023	Perawatan rutin
8	Speedboat Pengawas Dolphin 024	Perawatan rutin
9	Speedboat Pengawas Napoleon 015	Perawatan rutin
10	Speedboat Pengawas Napoleon 016	Docking
11	Speedboat Pengawas Napoleon 027	Overhaul
12	Speedboat Pengawas Napoleon 035	Perawatan rutin

No	Sarana dan Prasarana	Perawatan
13	Speedboat Pengawas Hiu Biru 01	Perawatan rutin
14	Speedboat Pengawas Hiu Biru 02	Perawatan rutin
15	Rigid Inflatable Boat	Perawatan rutin
16	Rubber Boat Sadai	Perawatan rutin

Tujuan indikator ini untuk mengukur sejauhmana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP. Tercapainya indikator “*Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP*” dikarenakan seluruh sarana pengawasan berupa kapal dan *speedboat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam dilaksanakan perawatan baik rutin maupun darurat, sehingga armada pengawasan siap beroperasi. Indikator ini merupakan indikator baru yang ditargetkan pada tahun ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target renstra, maka konsisten sebesar 100%.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP lainnya, capaian indikator ini sama 100% karena perawatan sarana dan prasarana dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu untuk perawatan kapal dan *speedboat* pengawas pasti dilakukan sebab ada perawatan rutin yang harus dilakukan agar unit-unit tersebut siap beroperasi. Pagu anggaran tahun 2023 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp.

8.019.600.000,- dan diadakan revisi menjadi Rp. 7.756.210.000,- realisasi anggaran 99,99% atau sebesar Rp. 7.755.215.819,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2.1 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)** yaitu:

- 7) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2023 sebesar 100 dan tercapai 100. Hal ini dikarenakan adanya penambahan empat Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini. Pengawasan dilakukan terhadap 11 Pelaku usaha Pulau-Pulau Kecil, 19 Pelaku usaha ruang laut, 9 Pelaku usaha wilayah pesisir, 16 Pelaku usaha pencemaran perairan, 5 Pelaku usaha produk kelautan, 11 Pelaku usaha jasa kelautan, 11 Pelaku usaha pemanfaatan wilayah konservasi, 7 Pelaku usaha ikan dilindungi dan 49 Pelaku usaha bebas kegiatan ikan yang merusak. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika

dibandingkan dengan target pada renstra, maka target pada akhir periode renstra konsisten sebesar 100.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2023 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

a) Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

b) Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

c) Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi.

d) Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

e) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

f) Wisata tirta lainnya

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking mangrove*, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

g) Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan

h) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Usaha yang meliputi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku atau Aktifitas penunjang treatment air.

i) Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

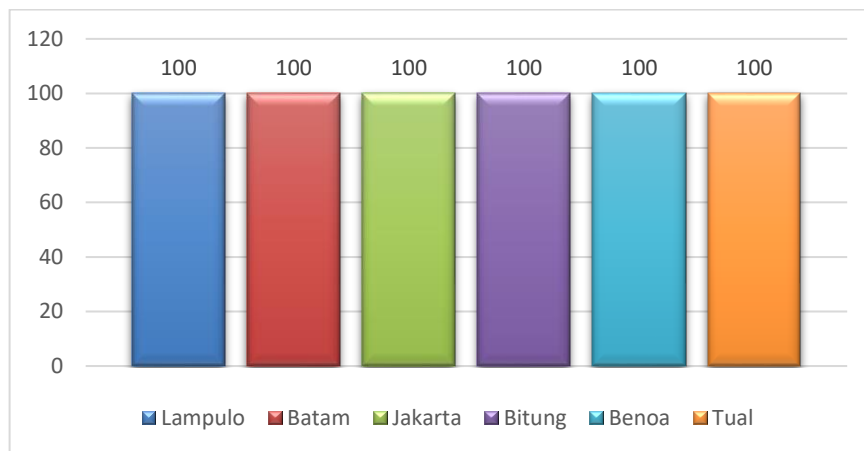
j) Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan).

k) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)

Parameter :

- Memiliki dokumen KKPR
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2023 sama yaitu 100. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan. Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.571.938.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 782.838.000,-, serta terealisasi sebesar Rp. 772.697.492,- atau 98,70%.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2.2**

(Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan) yaitu:

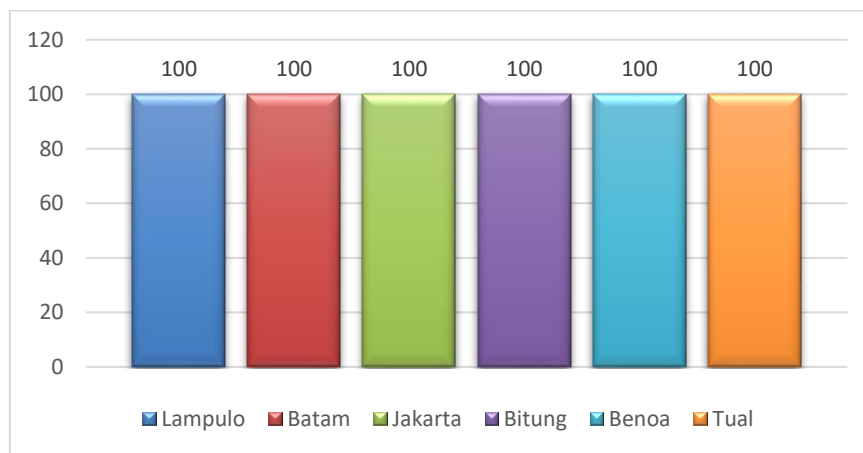
8) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU8	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan 100% menjadi target triwulanan dan tercapai 100%. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Tercapainya target ini dikarenakan seluruh informasi maupun aduan yang disampaikan kepada Pangkalan PSDKP Batam dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan telah selesai ditindaklanjuti yaitu pelanggaran PT. Blue Steel Indonesia dan PT. Tri Tunas Unggul yang melakukan kegiatan pengelolaan ruang lanjut tanpa

dilengkapi dokumen perizinan serta menimbulkan kerusakan sumber daya kelautan. Maka terhadap kedua pelaku usaha tersebut telah dikenakan denda sanksi administratif dan mengurus perizinan. Dengan adanya pengurusan perizinan, maka akan ada tinjauan dan pulbaket kepada lokasi dan kegiatan pelaku usaha tersebut. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target pada renstra, maka target pada akhir periode renstra konsisten sebesar 100.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2023 sama yaitu 100%. Karena terselesaikannya kegiatan tindak lanjut atas hasil aduan, informasi dan data bidang kelautan sehingga dilakukannya kegiatan pengawasan sampai dengan pengenaan sanksi administratif. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2023 sebesar Rp. 514.637.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 510.078.086,- atau 99,11%.

Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3.1 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan)** yaitu:

9) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU9	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada tahun 2023 adalah 100. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, yaitu pengawasan kapal perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap 26 KBLI pelaku usaha pengawasan rutin berbasis OSS dan 288 KBLI pelaku usaha pengawasan insidental. Hasil tersebut terdiri dari 115 KBLI Penangkapan Ikan, 96 KBLI Budidaya Ikan, 29 KBLI Pengolahan Hasil Perikanan dan 34 KBLI Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target pada renstra, maka target pada akhir periode renstra konsisten sebesar 100%.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. yang terbentuk dari beberapa komponen berikut:

a) Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

b) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO.

c) Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2023 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat. Pemeriksaa importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan .

d) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

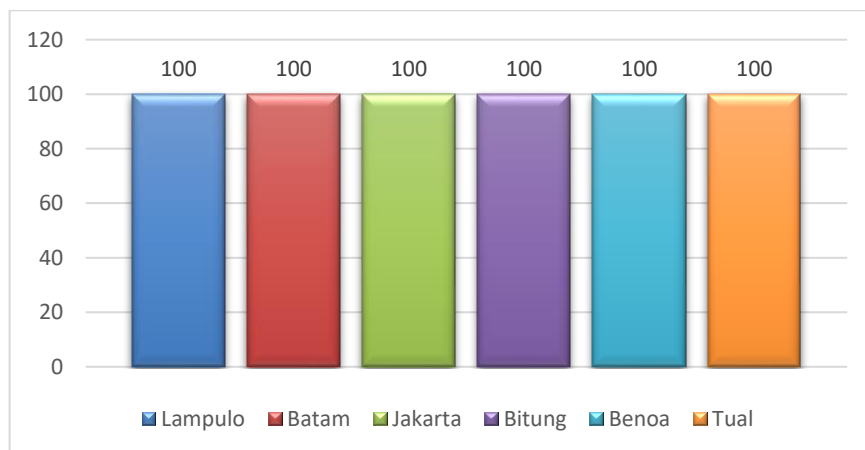
Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah.

e) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.

f) Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan).



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2023 sama yaitu 100. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tahun 2023 pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dianggarkan sebesar Rp. 1.352.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 691.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp 688.291.865,- atau 99,52%.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3.2 (Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan)** yaitu:

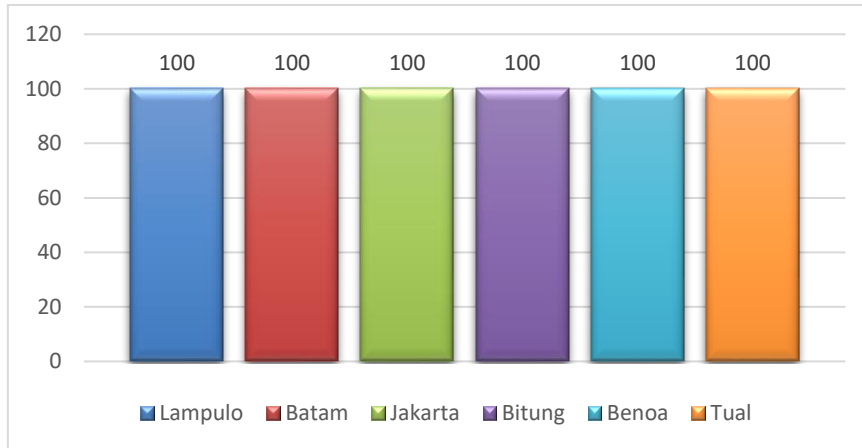
10) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU10	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan 100% menjadi target triwulanan dan tercapai 100%. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh pengawas perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

Tercapainya target ini dikarenakan seluruh informasi maupun aduan yang disampaikan kepada Pangkalan PSDKP Batam dalam bidang pengelolaan sumber daya perikanan telah selesai ditindaklanjuti yaitu pelanggaran CV. Sumber Rezeki dan PT. Darwin Karindo Mandiri yang melakukan kegiatan pemasaran hasil perikanan tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Maka terhadap kedua pelaku usaha tersebut telah dikenakan denda sanksi administratif dan mengurus perizinan. Dengan adanya pengurusan perizinan, maka akan ada tinjauan dan pulbaket kepada lokasi dan

kegiatan pelaku usaha tersebut. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target pada renstra, maka target pada akhir periode renstra konsisten sebesar 100.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2023 sama yaitu 100%. Karena terselesainya kegiatan tindak lanjut atas hasil aduan, informasi dan data bidang perikanan sehingga dilakukannya kegiatan pengawasan sampai dengan pengenaan sanksi administratif. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2023 sebesar Rp. 452.637.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 449.299.547,- atau 99,26%.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4.1 (Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas)** yaitu:

11) Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	86,79	108,49
		2024	82		

Capaian indeks pengenaaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 86,79. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pengenaaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaaan sanksi administratif pada 47 pelaku usaha yang terdiri dari 34 pelaku usaha bidang perikanan dan 13 bidang kelautan serta 53 kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran dari hasil analisis SPKP. Total denda yang dikenakan sebesar Rp. 3.298.973.871,- dan sudah dibayarkan menjadi PNBP.

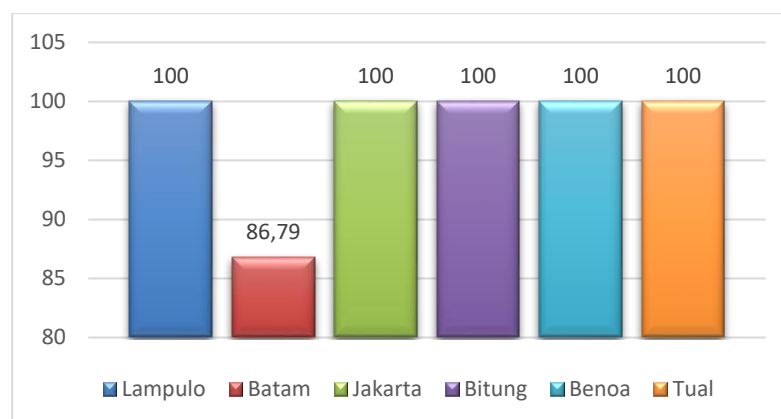
NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KET
1	KM. Tenaga Baru	Denda	Sudah melakukan pembayaran
2	KM. Nisan Laut	Denda	Sudah melakukan pembayaran
3	KM. Pulau Merak	Denda	Sudah melakukan pembayaran
4	KM. Pinang Karimun 66	Denda	Sudah melakukan pembayaran
5	KM. Rosmalia Jaya	Denda	Sudah melakukan pembayaran
6	KM. Siti Rahayu	Denda	Sudah melakukan pembayaran
7	KM. Fortune Line	Migrasi	Sudah Migrasi
8	KM. Indah I	Migrasi	Sudah Migrasi
9	KM. Cipta Harapan I	Migrasi	Sudah Migrasi
10	KM. Semangat Jaya 89	Migrasi	Sudah Migrasi
11	KM. Mulia Indah 2A	Migrasi	Sudah Migrasi
12	KM. Apel Hijau	Denda	Sudah melakukan pembayaran
13	KM. Apel Hijau 8	Denda	Sudah melakukan pembayaran
14	KM. Hasil Laut	Denda	Sudah melakukan pembayaran
15	KM.Maju Jaya	Denda	Sudah melakukan pembayaran
16	KM. Bintang Tjandra Makmur	Denda	Sudah melakukan pembayaran
17	KM. Tirta Bakti	Denda	Sudah melakukan pembayaran
18	KM. Setiawan II	Denda	Sudah melakukan pembayaran
19	KM. Kasih Hati 3	SP1	SP1

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KET
20	KM. Pariwisata	SP1	SP1
21	KM. Aneka Jaya	SP1	SP1
22	KM. Berlian Laut-85	SP1	SP1
23	KM. Ketemu Jaya IV	SP1	SP1
24	KM. Merbau Jaya I	SP1	SP1
25	KM. Indah Surya Kncana	SP1	SP1
26	KM. Hasil Lautan	Denda	Sudah melakukan pembayaran
27	CV. Sumber Rezeki	SP1	SP1
28	CV. Lillah	Di segel komoditi salemnya	Sudah dilakukan penyegelan
29	CV 99 Jaya	Di segel komoditi salemnya	Sudah dilakukan penyegelan
30	CV. Darwin Karindo Mandiri	Denda	Sudah melakukan pembayaran
31	PT. Trisula Cakra Buana	Penghentian kegiatan usaha	Sudah dilakukan penyegelan
32	PT. Dwimitra Mandiri Prima	Penghentian kegiatan usaha	Sudah dilakukan penyegelan
33	PT. TAHAI SUNHOK JAYA UTAMA	Penghentian kegiatan usaha	Sudah dilakukan penyegelan
34	PT. Cahaya Terang sejati	SP1	SP1
35	PT. Bintang Batam Pratama	Denda	Sudah melakukan pembayaran
36	Merah Putih Petro Gas	Denda	Sudah melakukan pembayaran
37	PT. BSSTEC	Denda	Sudah melakukan pembayaran
38	PT. Pulau Bawah	Denda	Sudah melakukan pembayaran
39	PT. Utama Resort Batam	Denda	Sudah melakukan pembayaran
40	PT. Blue Steel Indonesia	Denda	Sudah melakukan pembayaran
41	Budiyanto	Denda	Sudah melakukan pembayaran
42	PT. Dirgantara Inti Abadi	Denda	Sudah melakukan pembayaran
43	PT. Tri Tunas Unggul	Denda	Sudah melakukan pembayaran
44	PT. Indo Asean	Denda	Sudah melakukan pembayaran
45	PT. Tritunas Sinar Benua	Denda	Sudah melakukan pembayaran
46	PT. Pulau Bintang Emas	Denda	Sudah melakukan pembayaran
47	PT. Island Connections International	SP1	Sudah melakukan pembayaran
48	Rezeki Omega Indah	Tidak Melanggar	Sudah BAP
49	Marvander 66	Tidak Melanggar	Sudah BAP
50	Perintis Damai	Tidak Melanggar	Sudah BAP
51	Victor Samudra	Tidak Melanggar	Sudah BAP
52	Megatama Putri	Tidak Melanggar	Sudah BAP
53	Sahabat Samudra	Tidak Melanggar	Sudah BAP
54	Tanjung Sari Perkasa	Tidak Melanggar	Sudah BAP
55	Tenaga Baru	SP1	SP1

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KET
56	Andesson Jaya 3	SP1	SP1
57	Anugrah Laut - 1	SP1	SP1
58	Sumber Laut	SP2	SP2
59	Dwi Daya	SP1	SP1
60	Maju Jaya 688	SP1	SP1
61	Surya Citra Nusantara 07	SP2	SP2
62	Bintang Jaya Indah	SP2	SP2
63	Batam Asahan	SP1	SP1
64	Andesson Jaya 3	SP2	SP2
65	Perintis Damai	SP1	SP1
66	Hidup Lagi	Tidak Melanggar	Sudah BAP
67	Surya Citra Nusantara - 07	Tidak Melanggar	Sudah BAP
68	Naya Indah	Tidak Melanggar	Sudah BAP
69	Buana Sukses	Tidak Melanggar	Sudah BAP
70	Tun Tiang	Tidak Melanggar	Sudah BAP
71	Sumber Natuna	SP1	SP1
72	Cahaya Gemilang - 1	SP2	SP2
73	Sumber Rezeki	SP1	SP1
74	Fitri Hidayanti II	SP1	SP1
75	Tanjung Sari Perkasa	Pemanggilan	-
76	Berkat VIII	Pemanggilan	-
77	Enam Saudara I	Pemanggilan	-
78	Bintang Natuna	Pemanggilan	-
79	Antena	Pemanggilan	-
80	Anugerah Pratama	Pemanggilan	-
81	Bintang Jaya Indah	Pemanggilan	-
82	Surya Samudra	Pemanggilan	-
83	Indah Bersama II	Pemanggilan	-
84	Laksana Teman Jaya	Pemanggilan	-
85	Sumber Jadi	Tidak Melanggar	Sudah BAP
86	Tirta Jaya 99	Pemanggilan	-
87	Bintang Indah	Tidak Melanggar	Sudah BAP
88	Metro Jaya	Tidak Melanggar	Sudah BAP
89	Metro Jaya 18	Tidak Melanggar	Sudah BAP
90	Mikonata 88	Tidak Melanggar	Sudah BAP
91	Sinar Laut II	Tidak Melanggar	Sudah BAP
92	Bintang Jaya - II	Tidak Melanggar	Sudah BAP
93	Djadi Mari In	Pemanggilan	-
94	Tristan V	Tidak Melanggar	Sudah BAP
95	Surya Citra Nusantara - 07	Pemanggilan	-
96	Jaya Lestari - III	Tidak Melanggar	Sudah BAP

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KET
97	Maju Jaya II	Tidak Melanggar	Sudah BAP
98	Naga Tuing - II	Pemanggilan	-
99	Sinar Indah III	Tidak Melanggar	Sudah BAP
100	Karya Santi	Tidak Melanggar	Sudah BAP

Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target pada renstra, maka target pada akhir periode renstra mengalami kenaikan menjadi 82.



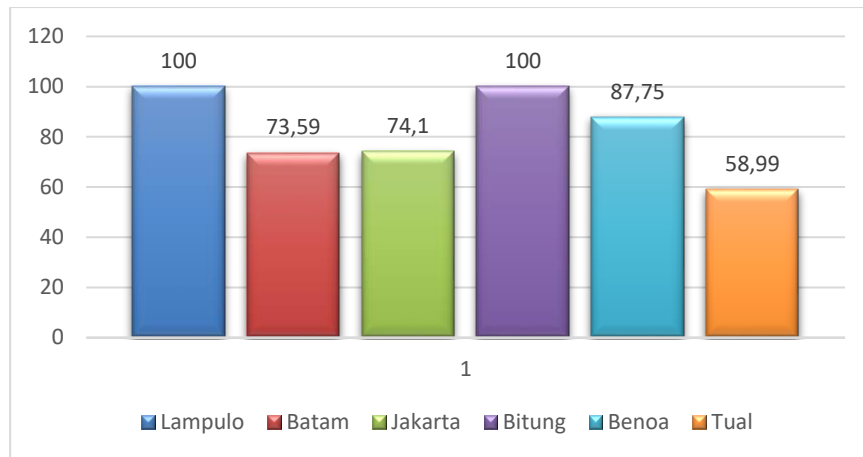
Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian indikator Pangkalan PSDKP Batam terdapat selisih. Hal ini dikarenakan masih belum ditindak lanjutinya beberapa pelaku usaha yang mendapatkan peringatan dari hasil analisis SPKP. Sebagian besar pelaku usaha berada di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam namun kapal perikanan yang dioperasikan memiliki izin Pelabuhan Pangkalan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam. Sehingga perlu menunggu dan penjadwalan ulang pada saat kapal sudah sandar di Pelabuhan Pangkalan. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 untuk pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 100.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 84.856.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 84.854.638,- atau 99,99%.

12) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	73,59	91,99
		2024	82		

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 73,59. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini ada pada tahun 2023.

Kurang optimalnya capaian ini dikarenakan masih belum ditindak lanjutinya beberapa pelaku usaha yang mendapatkan peringatan dari hasil analisis SPKP. Dari 53 kapal indikasi pelanggaran hasil analisis SPKP sudah ditindaklanjuti sebanyak 39 kapal berupa BAP dan pengenaan sanksi administratif dan 14 kapal dalam proses pemanggilan. Sebagian besar pelaku usaha berada di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam namun kapal perikanan yang dioperasikan memiliki izin Pelabuhan Pangkalan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam. sebagai Upaya perbaikan kedepannya perlu dilakukan penjadwalan ulang terhadap kapal yang belum dilakukan tidak lanjut berupa permintaan keterangan ketika kapa sudah sandar di Pelabuhan Pangkalan.



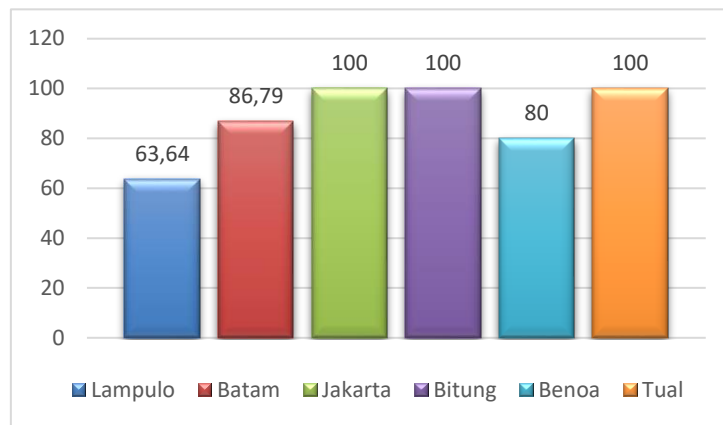
Capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Tual. Hal ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Batam telah menindak lanjuti pelaku usaha yang mendapatkan peringatan dari hasil analisis SPKP. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 untuk analisis pemantauan kapal perikanan mendapat pagu sebesar Rp 452.637.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 449.299.547,- atau 99,26%.

13) Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU13	Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	86,79	108,49
		2024	82		

Capaian indeks Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 86,79. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini ada pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan penerapan sanksi administratif pada 47 pelaku usaha yang terdiri dari 34 pelaku usaha bidang perikanan dan 13 bidang kelautan serta 53 kapal perikanan yang terindikasi melakukan

pelanggaran dari hasil analisis SPKP. Total denda yang dikenakan sebesar Rp. 3.298.973.871,- dan sudah dibayarkan menjadi PNBP.



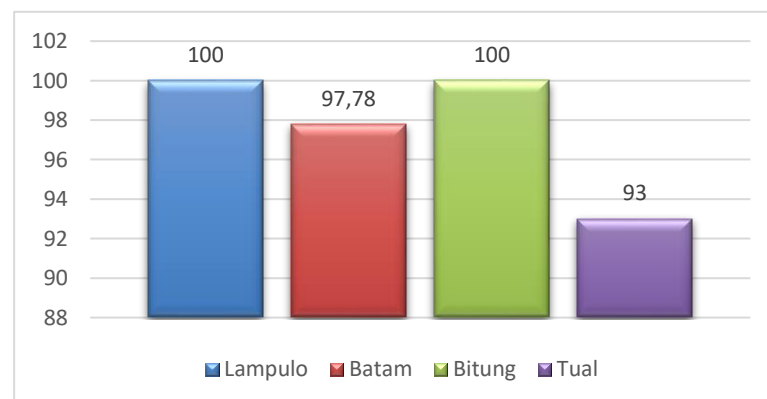
Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian indikator Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo dan Bena. Pada Pangkalan PSDKP Batam telah menindak lanjuti sebagian besar dari pengenaan sanksi administratif. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 untuk pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 100.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 84.856.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 84.854.638,- atau 99,99%.

Evaluasi dan analisis pada IKU14 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4.2 (Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas)** yaitu:

14) Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU14	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	93	97,78	105,14
		2024	93		

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai 100 dari target 97,78. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapainya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 telah menangani 9 kasus TPP dengan 8 kasus telah selesai Tahap II dan 1 kasus dalam tahap penyidikan. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target pada renstra, maka target pada akhir periode renstra konsisten sebesar 93.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Tual, capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi yang dikarenakan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 telah menangani 9 kasus TPP dengan 8 kasus telah selesai Tahap II dan 1 kasus dalam tahap penyidikan. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp 591.714.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 591.565.760,- atau 99,97%.

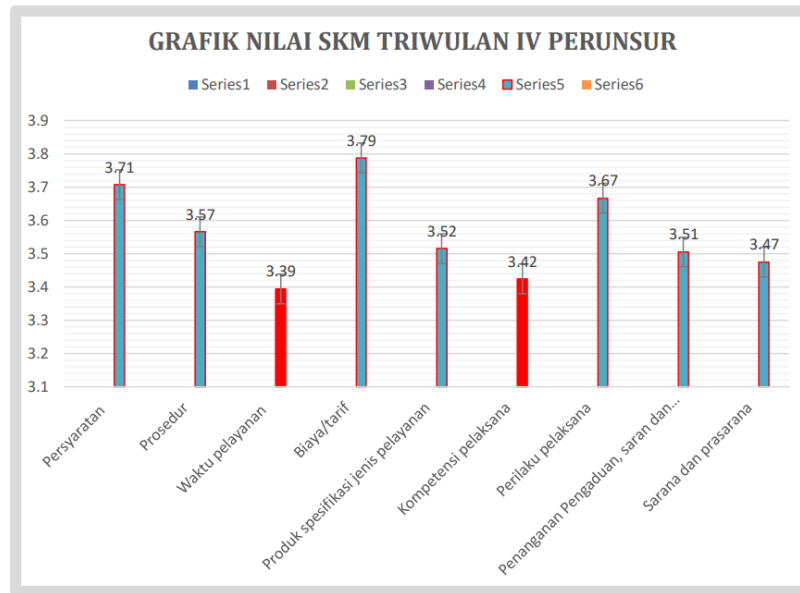
Evaluasi dan analisis pada IKU15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21, IK22, IK23, IK24, IK25, IK26 dan IK27 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 5.1 (Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP)** yaitu:

15) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

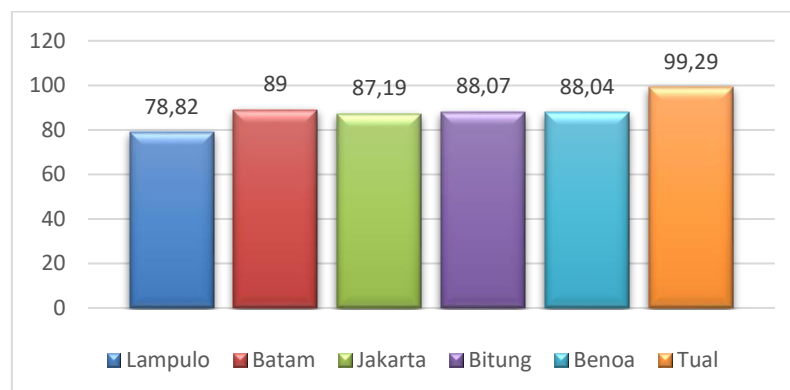
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	2020	80	87,08	108,85
		2021	80	91,40	114,25
		2022	80	88,93	111,16
		2023	80	89,00	111,25
		2024	85		

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023 adalah 89,00. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Capaian tersebut diperoleh dari 2023 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 89,00 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal dengan rincian sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan indeks sebesar 1,93. Hal ini dikarenakan terdapat selisih jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pangkalan PSDKP Batam. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah acuan untuk peningkatan pelayanan di tahun berikutnya. Jika dibandingkan renstra, target Pangkalan PSDKP Batam meningkat menjadi 85 karena Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pelayanan yang diberikan akan semakin baik.



Capain indikator ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta, Bitung dan Benoa. Pelayanan yang baik dan prima dilaksanakan oleh petugas Pangkalan PSDKP Batam memberikan dampak yang positif terhadap penilaian dari pengguna layanan. Capaian tersebut diperoleh

dari 99 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 89,00 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah acuan untuk peningkatan pelayanan di tahun berikutnya. Pada tahun 2023 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 152.008.000.- dan dilakukan revisi menjadi Rp. 75.830.000.- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 73.926.587.- atau 97,49%.

16) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	75	88,23	117,64
		2021	75	78,41	104,55
		2022	75	80,58	107,44
		2023	75	90,90	120,00
		2024	75		

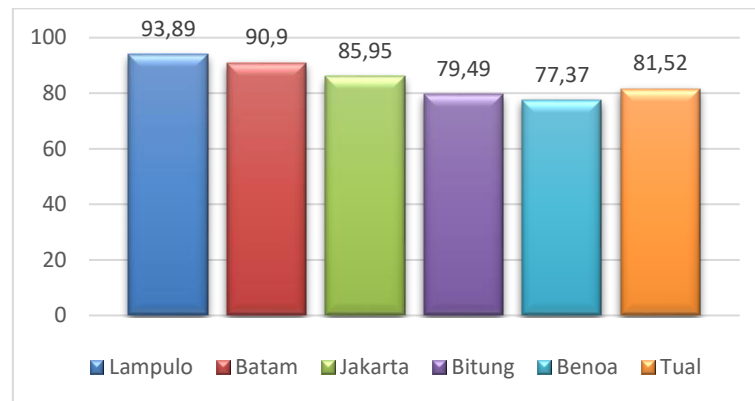
Target Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 adalah 75 dan tercapai 90,90. Tercapainya target ini dikarenakan sistem reformasi birokrasi di Pangkalan PSDKP Batam berjalan dengan baik serta adanya pendampingan dari Sekretariat Ditjen. PSDKP mengenai pemenuhan dan kualitas dokumen WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan

jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk rincian pencapaian nilai sebagai berikut.

Penilaian			Bobot	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT		60,00	52,28	
	I.	PEMENUHAN	30,00	25,79	85,95%
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,30	82,52%
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,42	69,05%
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	3,20	64,00%
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	5,00	100,00%
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,95	92,68%
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,92	98,33%
	II.	REFORM	30,00	26,50	88,32%
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,42	85,50%
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,75	78,57%
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	5,00	100,00%
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	5,00	100,00%
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,58	87,67%
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,75	75,00%
TOTAL PENGUNGKIT				52,28	87,13%
B.	HASIL		40,00	38,62	
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	21,16	94,06%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,41	99,50%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75	75,00%
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	17,46	99,75%
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	17,46	99,75%
TOTAL HASIL				38,62	96,55%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				90,90	

Selanjutnya, penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jika dibandingkan tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 10,32 yang menandakan bahwa Reformasi dan

birokrasi di Pangkalan PSDKP Batam semakin baik dari tahun sebelumnya. Dibandingkan renstra, target pada indikator ini konsisten sebesar 75.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Jakarta, Bitung, Benoa dan Tual. Hal ini dikarenakan Sebagian besar dokumen reformasi birokrasi telah tersedia, hanya saja masih terdapat beberapa evaluasi pada redaksionalnya. Pada tahun 2023 pagu anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 81.839.000.- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 80.435.331.- atau 98,28%.

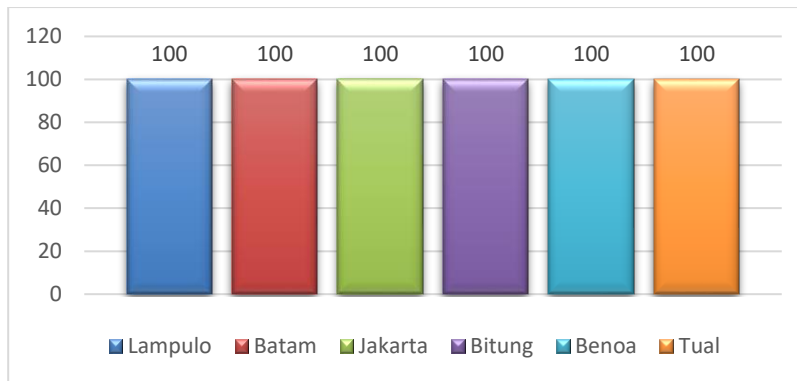
17) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100		

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Tercapainya indikator ini dikarenakan telah dilakukan pengendalian mitigasi melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan setiap triwulan pada pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru ditargetkan pada tahun 2023.



Capaian indikator ini pada seluruh Pangkalan PSDKP sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada kegiatan yang memiliki risiko besar telah dilakukan mitigasi sejak awal. Sehingga pada saat pelaksanaan dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Adapun anggaran tahun 2023 untuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 164.935.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.934.389,- atau 99,99%.

18) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

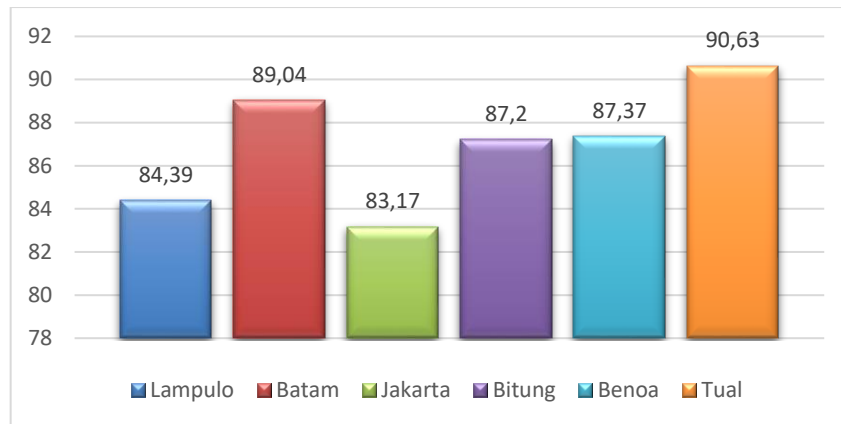
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	72	73,3	101,80
		2021	73	79,03	108,27
		2022	77	80,43	103,89
		2023	78	89,04	114,15
		2024	79		

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2022 adalah 78 dan tercapai 89,04. Hal ini dikarenakan pegawai Pangkalan PSDKP Batam semakin banyak yang mengikuti pelatihan dan bimtek sehingga memperoleh sertifikat. Selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dan sudah aktif Kembali dengan rincian sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pegawai Mengikuti
1	Bimtek/Pelatihan/Diklat	32
2	Tugas Belajar	3
3	Izin Belajar	1

Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan indeks sebesar 8,61. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pegawai yang mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Bimtek, Seminar maupun FGD banyak dilaksanakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga semakin mempermudah setiap pegawai dalam mendapatkan fasilitas pelatihan dan terhadap pegawai yang menjadi peserta akan mendapatkan Sertifikat. Jika dibandingkan dengan renstra, maka terdapat konsistensi target yaitu sebesar 78 yang bertujuan untuk mempertahankan capaian yang sudah dilaksanakan.



IP ASN Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta, Bitung dan Benoa. Hal ini menunjukkan pegawai Pangkalan PSDKP Batam Sebagian besar telah mengikuti pelatihan maupun bimtek secara *online* maupun *offline*. Adapun anggaran tahun 2023 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu penatausahaan SDM dan jabatan fungsional sebesar Rp. 105.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 78.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.390.378,- atau 99,73%.

19) Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80,5	81,25	100,93
		2024	80,5		

Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapatkan target 90 dan tercapai 81,25. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh

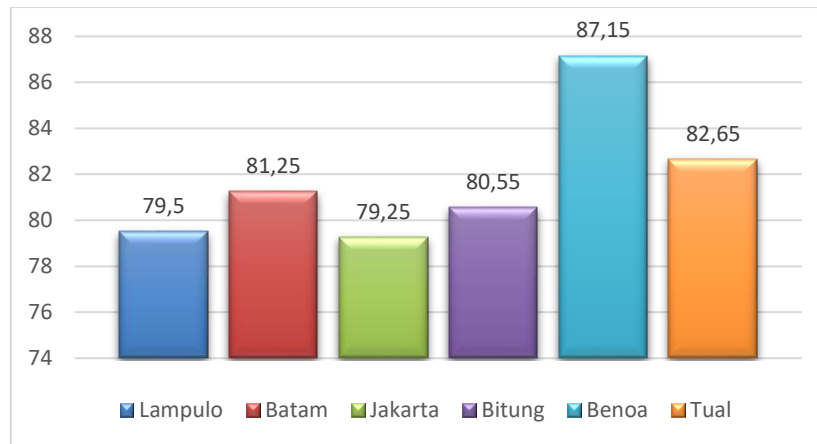
Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB.

Pangkalan PSDKP Batam (unit 1) pada telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat II KKP dengan hasil sebagai berikut.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Eselon I	Nilai Akuntabilitas Kinerja				Unit 3	Unit 4
				Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4		
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	23.70	24.30	22.80	23.70	24.30		
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	26.10	24.60	24.60	26.10	26.10		
3.	PELAPORAN KINERJA	15	13.80	11.85	12.60	13.35	11.85		
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	20.00	20.50	19.25	19.25	19.25		
NILAI UNIT KERJA		100	83.60	81.25	79.25	82.40	81.50		
			A	A	BB	A	A		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Eselon I	Nilai Unit Kerja Sampel				Nilai Unit	Nilai Total	%
				Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4			
1.	PERENCANAAN KINERJA									
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.00	100.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran Kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	3.60	0.79	0.79	0.90	0.79	3.26	6.86	76.25
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	5.25	1.50	1.31	1.31	1.50	5.63	10.88	72.50
		30.00	11.85					11.89	23.74	79.13
2.	PENGUKURAN KINERJA									
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.00	100.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	4.05	1.01	1.01	1.01	1.01	4.05	8.10	90.00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	6.00	1.31	1.31	1.50	1.50	5.63	11.63	77.50
		30.00	13.05					12.68	26.73	85.75
3.	PELAPORAN KINERJA									
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38	1.50	3.00	100.00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	2.03	0.45	0.45	0.45	0.45	1.80	3.83	85.00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	3.38	0.66	0.75	0.84	0.66	2.91	6.28	83.75
		15.00	6.90					6.21	13.11	87.38
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL									
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	2.25	1.13	1.13	1.13	1.13	2.25	4.50	90.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	3.38	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.38	85.00
3.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	4.38	1.25	1.09	1.09	1.09	4.53	8.91	71.25
		25.00	10.00					9.78	19.78	79.13
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100.00							82.35	

Terhadap hasil evaluasi tersebut maka SAKIP di Pangkalan PSDKP Batam telah berpredikat Baik. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim Monev Ditjen. PSDKP sehingga terjadi perbaikan redaksi pada laporan serta evaluasi pada akuntabilitas kinerja internal. Target sebesar 80,5 akan dipertahankan hingga berakhirnya periode renstra, sehingga kinerja Pangkalan PSDKP Batam tidak mengalami penurunan. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Lampulo, Bitung dan Jakarta, capaian indikator ini di Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi telah tersedia. Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 10.302.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.301.558,- atau 99,99%.

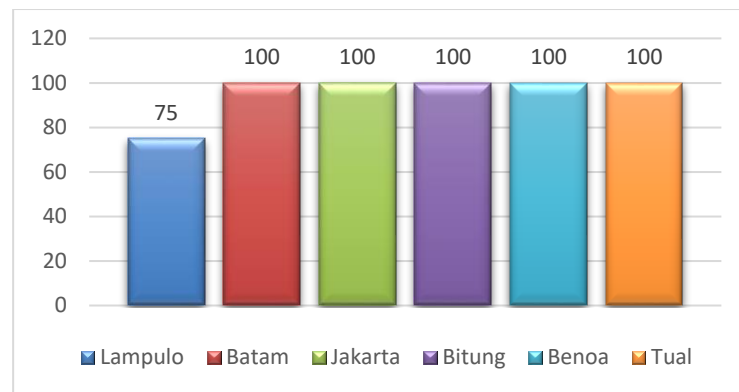
20) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK20	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	70	100	120,00
		2023	75	100	120,00
		2024	80		

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 75% dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan 4 rekomendasi hasil pengawasan telah ditindak seluruhnya. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik

bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pada tahun 2022 capaian indikator ini sama dengan 2023 yaitu 100%. Seluruh rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditindaklanjuti dan disampaikan. Terdapat beberapa audit, reviu dan evaluasi mengenai keuangan, kinerja, BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal KKP, Pangkalan PSDKP Batam telah nihil temuan. Apabila disandingkan dengan resntra, target ini terdapat peningkatan menjadi 80%.



Capaian indikator ini di Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Lampulo. Hal ini dikarenakan seluruh rekomendasi tindak lanjut Itjen di Pangkalan PSDKP Batam seluruhnya telah dilaksanakan, sedangkan di Pangkalan PSKDP Lampulo masih terdapat rekomendasi yang belum ditindak lanjuti. Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk indikator ini yaitu pengelolaan data pengawasan SDKP sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 4.434.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.433.444,- atau 99,99%.

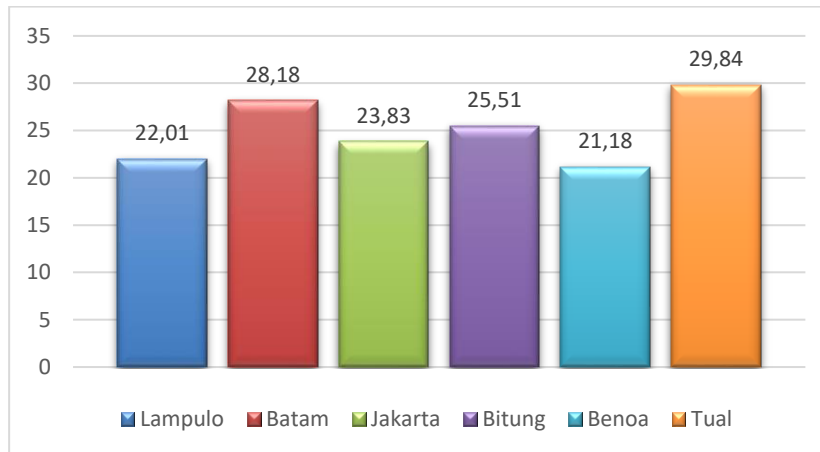
21) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	21	23,16	110,29
		2023	21	28,18	120,00
		2024	21		

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 21 dan tercapai 28,18. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hargai, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam dengan rincian sebagai berikut.

No	KRITERIA	NILAI
1	Tim Satker	5
2	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	5
3	Lima Menit Sebelum Jadwal	2
4	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5 R)	1,34
5	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	1,34
6	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	3
7	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	1
8	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	1
9	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	1
10	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	3
11	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	1,5
12	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	3
TOTAL		28,18

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka terdapat peningkatan nilai sebesar 5,02 di tahun 2023. Terdapat perbaikan pada beberapa aspek yang membuat nilai pada tahun 2023 meningkat. Apabila dibandingkan dengan akhir periode renstra, target Pangkalan PSDKP Batam konsisten sebesar 21.



Capaian indikator ini pada Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta, Bitung dan Benoa. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen budaya kerja serta pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja telah dilakukan. Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 20.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.335.500,- atau 99,99%.

22) Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam

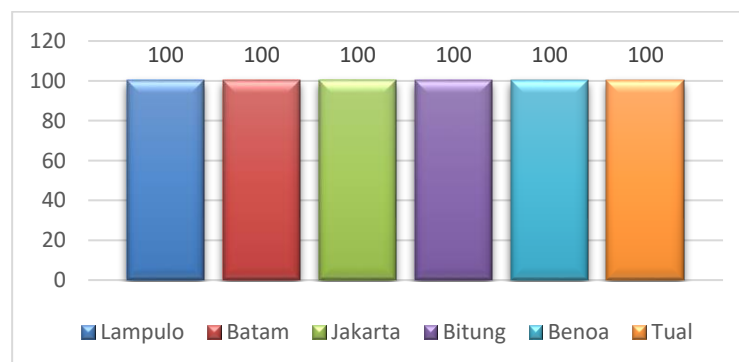
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	1	1	100,00
		2023	1	1	100,00
		2024	1		

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan tercapai 1. Inovasi Pangkalan PSDKP Batam adalah GEO MARFISH

dengan tujuan untuk mempermudah perolehan data pengawasan dan peta kerawanan bidang kelautan dan perikanan. Dengan adanya aplikasi ini, pengawas perikanan dan Polsus WP3K dapat mengetahui lokasi pasti pelaku usaha yang akan maupun sudah dilakukan pengawasan. Hal ini tentu membantu tugas petugas dalam pelaksanaan kegiatan.

Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 membuat inovasi aplikasi SICEPAT KILAT (Sistem Identifikasi Cepat Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Langsung dan Akurat). Dengan adanya aplikasi ini, proses pendataan awak kapal kasus TPKP dapat lebih cepat serta tersimpan dalam database. Sehingga apabila ada awak kapal yang telah terdaftar sebelumnya akan terlihat. Untuk selanjutnya aplikasi ini akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan maupun Imigrasi guna mempercepat proses penyelesaian kasus TPKP. Capaian pada indikator ini pada tahun 2022 dan 2023 sama yaitu 1 inovasi.

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatentan.



Pangkalan PSDKP Batam beserta dengan UPT lainnya telah membuat masing-masing satu inovasi. Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk implementasi program

budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 20.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.335.500,- atau 99,99%.

23) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	82	85	103,66
		2021	84	89,72	105,95
		2022	86	100	116,28
		2023	92	133,33	120,00
		2024	93		

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 133,33%. Semula pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi *bitrix.24*, namun sekarang sudah diganti dengan aplikasi portal.kkp (*collaboration office/coofis*). Belum optimalnya pencapaian ini karena pegawai *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis Postingan* yang dilakukan yaitu minimal delapan kali dalam tiga bulan dengan memperhatikan isi berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya.

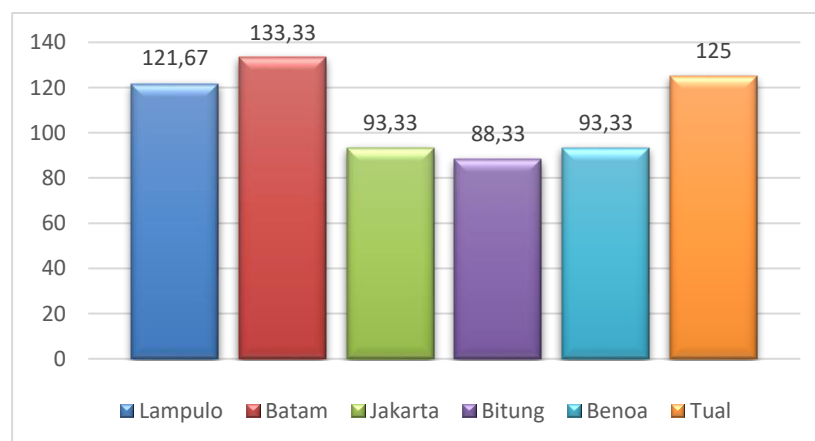
Diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. ⁽²⁾ keikutsertaan pada aplikasi *coofis* (Level 3 dan 4) dan ⁽³⁾ keaktifan pada aplikasi *coofis* (Level 3, 4 dan staf).

Optimalnya pencapaian ini karena operator *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis. Postingan* yang dilakukan yaitu minimal per triwulan sebanyak 8 berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan

dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut.

Level	Keaktifan (Kali)								Realisasi	Target	%
	Aktif 1	Aktif 2	Aktif 3	Aktif 4	Aktif 5	Aktif 6	Aktif 7	Aktif 8			
Kepala	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	133,33
Ketua Tim Kerja									20	15	133,33
Dukungan Manajemen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Penanganan Pelanggaran	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
									Rata-rata		133,33

Terdapat kenaikan capaian pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 33,33%. Hal ini dikarenakan operator *coofis* di Pangkalan PSDKP Batam rata-rata melakukan *postingan* sebanyak 8 kali dalam setiap triwulan yang mengandung unsur 5W+1H. Selain itu jumlah operator mengalami penambahan yang semula operator yang semula 6 operator menjadi 15 operator dengan ditambahkannya 9 operator dari Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Jika dibandingkan dengan target renstra, terdapat penambahan target menjadi 93% agar dapat mempertahankan pencapaian.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP lainnya, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat keaktifan penggunaan dan postingan pada aplikasi *coofis* Pangkalan PSKDP Batam lebih banyak. Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp 49.500.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 19.783.000,- dan terealisasi Rp. 17.781.908,- atau 99,99%.

24) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020			
		2021	72,5	100	120,00
		2022	75	100	120,00
		2023	77,5	100	120,00
		2024	80		

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 77,5 dan tercapai 100%. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

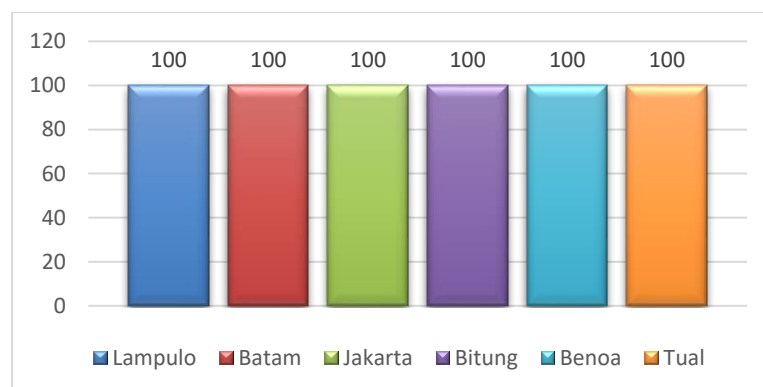
1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator ini sama yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola BMN Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan lancar. Adapun rincian capaian nilai sebagai berikut.

1. Kualitas perencanaan pengawasan dengan nilai 20;
2. Kualitas pelaksanaan pengawasan dengan nilai 40; dan
3. Nilai rata-rata kepatuhan pengelolaan BMN Eselon I dengan nilai 40.

Apabila dibandingkan dengan target renstra, terdapat penambahan target yaitu menjadi 80% karena Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan baik.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam pada indikator ini sama yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen serta pengelolaan BMN berjalan dengan baik. Pada tahun 2023 pagu tingkat

kepatuhan pengelolaan BMN yaitu pelaksanaan pengelolaan BMN sebesar Rp. 20.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.312.675,- atau 99,99%.

25) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK25	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020			
		2021	72,5	89,73	120,00
		2022	75	100	120,00
		2023	77,5	94,38	120,00
		2024	80		

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 75 dan menjadi target tahunan serta tercapai 94,38%. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

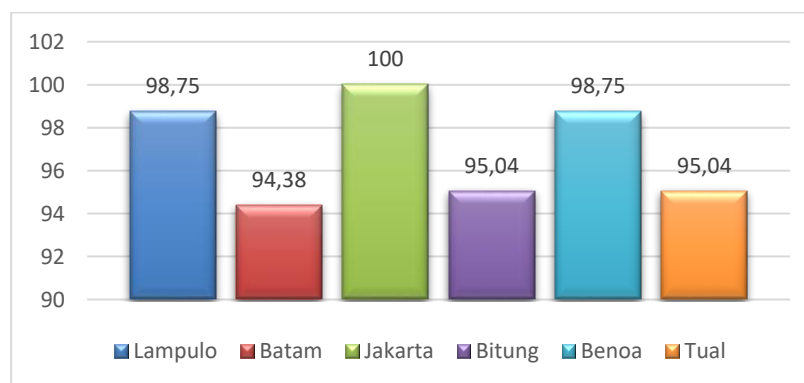
1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator ini terdapat selisih sebesar 5,62%. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola pengadaan barang dan jasa Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan

dengan lancar. Adapun rincian capaian nilai pengelolaan barang dan jasa sebagai berikut.

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis dengan nilai 10;
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan dengan nilai 12,68;
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE dengan nilai 6,70;
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan dengan nilai 45;
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ dengan nilai 5; dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Tw I s.d. Tw III Tahun 2021 dengan nilai 15.

Jika dibandingkan dengan target renstra, terdapat penambahan target yaitu menjadi 80% karena Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan baik.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam pada indikator ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya pengadaan yang tertunda dan harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, capaian pada indikator ini memenuhi target yang ditentukan.

Pada tahun 2023 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp. 238.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 238.075.750,- atau 99,99%.

26) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

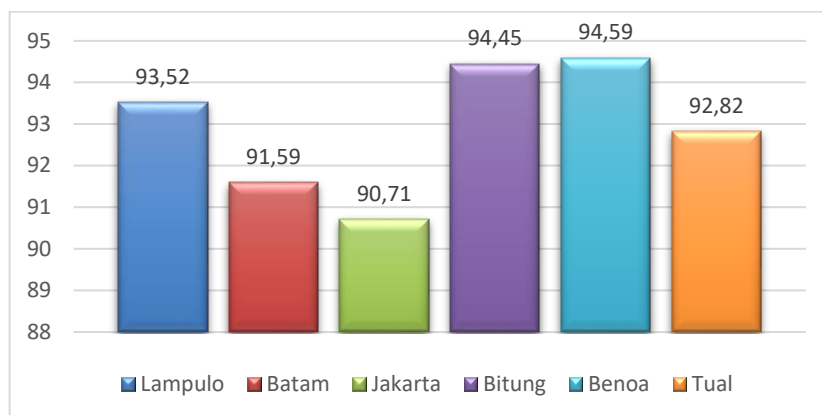
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK26	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	2020	88	94,06	106,89
		2021	89	97,08	109,08
		2022	89	96,09	107,97
		2023	93,75	91,59	97,70
		2024	93,75		

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 93,75 dan terealisasi 91,59. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu ⁽¹⁾ Revisi DIPA, ⁽²⁾ Deviasi DIPA ⁽³⁾ Pengelolaan UP, ⁽⁴⁾ LPj Bendahara, ⁽⁵⁾ Data Kontrak, ⁽⁶⁾ Penyelesaian Tagihan, ⁽⁷⁾ Penyerapan Anggaran Tahun 2022 ⁽⁸⁾ Retur SP2D, ⁽⁹⁾ Perencanaan Kas, ⁽¹⁰⁾ Pengembalian SPM, ⁽¹¹⁾ Dispensasi SPM dan ⁽¹²⁾ Pagu Minus dengan rincian sebagai berikut.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	63.91	82.26	94.00	100.00	93.43	100.00	100.00	91.59	100%	91.59
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.39	16.45	9.40	10.00	9.34	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	81.96		93.94					100.00			

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian dengan tahun 2023 terdapat selisih sebesar 4,50. Hal tersebut dikarenakan ada deviasi halaman III DIPA pada kualitas perencanaan anggaran. Selain itu dalam kualitas pelaksanaan anggaran

masih belum optimal pada pengelolaan dan penyerapan UP serta TUP. Sebagai Upaya perbaikan, maka pada periode selanjutnya akan dilakukan monitoring terhadap deviasi halaman III DIPA. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, maka Pangkalan PSDKP Batam konsisten pada target 93,75.

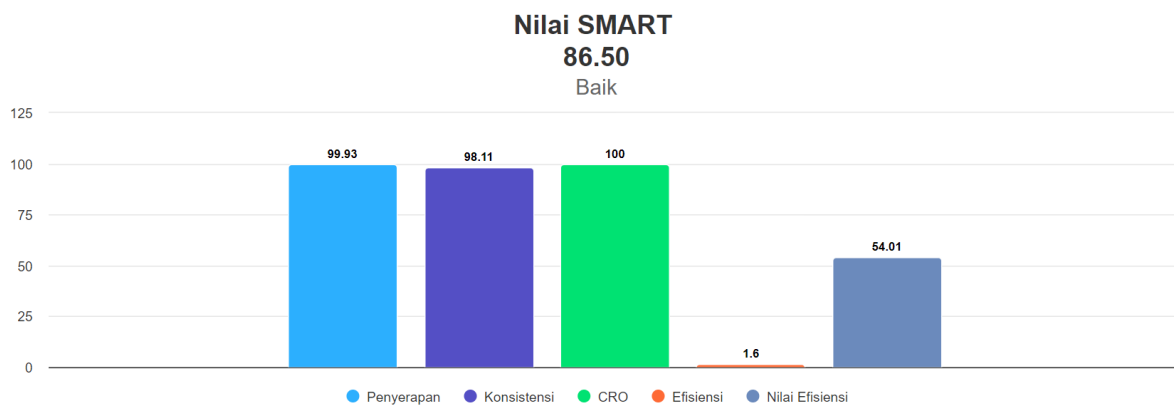


Dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Jakarta, capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan UP dan TUP serta deviasi halaman III DIPA lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan Jakarta, sehingga mempengaruhi nilai total IKPA. Adapun anggaran tahun 2023 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 164.935.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 164.934.389,- atau 99,99%.

27) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

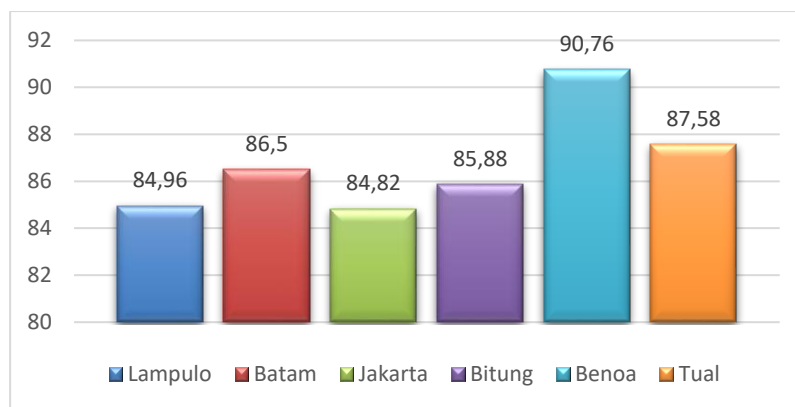
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	86	86,03	100,04
		2022	81	91,20	112,59
		2023	82	86,50	105,49
		2024	86		

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 82 dan tercapai 86,50. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian output pada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melebihi dari target yang ditentukan sehingga menambah nilai kinerja anggaran. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Untuk rincian NKA dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian pada tahun 2023 terdapat selisih sebesar 4,7. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 capaian output pada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melebihi dari target yang ditentukan sehingga menambah nilai kinerja anggaran. Jika dibandingkan dengan target renstra, Pangkalan PSDKP Batam optimis dengan target 86.



Apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo dan Jakarta, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi karena target output pada Pangkalan PSKDP Batam lebih besar. Kemudian target-target tersebut seluruhnya mencapai target dan beberapa ada yang melebihi dari target.

Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 124.236.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 119.785.074,- atau 96,92%.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP tahun 2023 terbilang efisien.

Efisiensi penggunaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023 sebesar 1,60. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan seluruhnya dengan penyerapan anggaran yang efisien. Sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari

satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan dan kelautan terutama pengawasan budidaya perikanan, kapal perikanan, pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi, pengawas perikanan serta polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam melakukan *onboard* pada kapal pengawas maupun speedboat pada saat unit-unit pengawasan tersebut melakukan operasi. Sehingga hal ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran terutama untuk transportasi perairan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023 sebesar Rp. 60.818.101.000,- yang kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 61.109.681.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 61.067.454.707,- atau 99,94%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	39.431.775.000	39.419.647.742	99,97
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	676.570.000	676.420.398	99,98
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	782.838.000	772.697.492	99,70
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	691.630.000	688.291.865	99,52
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	19.526.868.000	19.510.397.210	99,92
TOTAL			61.109.681.000	61.067.454.707	99,94

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kegiatan Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis serta evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 sebagian besar mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **104,70** dengan predikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.
3. Indikator **Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan** tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih adanya hasil analisis SPKP yang belum dilakukan tindak lanjut berupa Permintaan Keterangan (BAP) namun sudah dilakukan pemanggilan. Sebagian besar pelaku usaha berada di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam namun kapal perikanan yang dioperasikan memiliki izin Pelabuhan Pangkalan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sehingga

pelaksanaan permintaan keterangan akan dilakukan Ketika kapal perikanan yang terindikasi melaporkan kedatangan di Pelabuhan Pangkalan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam serta dilakukan penjadwalan ulang. Selain itu indikator **Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam** tidak mencapai target dikarenakan terdapat deviasi halaman III DIPA pada kualitas perencanaan anggaran serta dalam kualitas pelaksanaan anggaran masih belum optimal pada pengelolaan dan penyerapan UP serta TUP.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Nahkoda dan/atau Pemilik kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran dari hasil analisis SPKP Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada belum seluruhnya dilakukan permintaan keterangan	Melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan/atau Pemilik kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran SPKP
2.	Terdapat deviasi halaman III DIPA	Melakukan monitoring deviasi halaman III DIPA

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Turman Hardianto Maha**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam


Adin Nurawaluddin


Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN			
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
		4. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	8. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	10. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (persen)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		12. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		13. Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	14. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP			
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	15. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	80
		16. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju	75

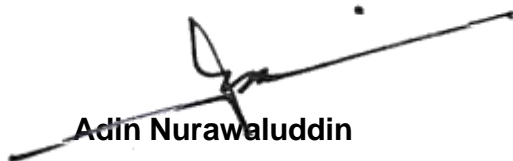
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	
17.		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	100
18.		Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	78
19.		Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	80,5
20.		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75
21.		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21
22.		Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (inovasi)	1
23.		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	92
24.		Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
25.		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
26.		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	93,75
27.		Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	39.431.775.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	782.838.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	691.630.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	676.570.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan</i>	
	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	19.526.868.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		61.109.681.000

Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

REVIU MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PANGKALAN PSDKP BATAM TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET					Keterangan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN												
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	-	-	-	80	90	-	-	-	250.000		IKU Baru
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	-	-	85	87,6	90	-	-	20.575.568	28.872.967		
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	-	-	85	87,6	90	-	-	2.800.957	2.360.731		
IKU4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	-	-	-	100	100	-	-	-	20.422.701		IKU Baru
IKU5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-	100	100	-	-	-	192.767		IKU Baru
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	-	-	-	100	100	-	-	-	7.756.210		IKU Baru
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN												
IKU7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	100	100	-	-	-	782.838		IKU Baru
IKU8	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	-	-	-	100	100	-	-	-	514.637		IKU Baru
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN												
IKU9	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	-	-	-	100	100	-	-	-	691.630		IKU Baru

IKU10	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	-	-	-	100	100	-	-	-	452.637		IKU Baru
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
IKU11	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	82	90	-	-	-	84.856		IKU Baru
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	80	82	-	-	-	452.637		IKU Baru
IKU13	Indeks penyelesaian tindak lanjut penenaan sanksi administratif	-	-	-	80	82	-	-	-	84.856		IKU Baru
IKU14	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	-	-	-	93	93	-	-	-	591.714		IKU Baru
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP												
IKU15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	80	80	80	85	53.876	38.788	40.058	75.830		
IK16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	75	75	75	75	75	24.680	24.680	20.800	81.839		
IK17	Persentase pelaksanaan pengendalian	-	-	-	100	100	-	-	-	164.935		IKU Baru

	kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam											
IK18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	73	77	78	79	38.000	53.600	95.000	78.600		
IK19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam				80,5	80,5	-	-	-	10.302		IKU Baru
IK20	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70	75	80	-	-	12.500	4.434		
IK21	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	21	21	21	-	-	3.000	20.335		
IK22	Jumlah inovasi yang dihasilkan Pengakalan PSDKP Batam	-	-	1	1	1	-	-	3.000	20.335		
IK23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	84	86	92	93	22.831	17.098	9.400	19.783		
IK24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	72,5	75	77,5	80	-	47.400	28.000	20.313		
IK25	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP	-	72,5	75	77,5	80	-	690.000	150.000	238.100		

	Batam											
IK26	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88	89	89	93,75	93,75	59.000	165.150	29.160	164.935		
IK27	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	86	81	82	86	-	39.572	27.600	124.236		